



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

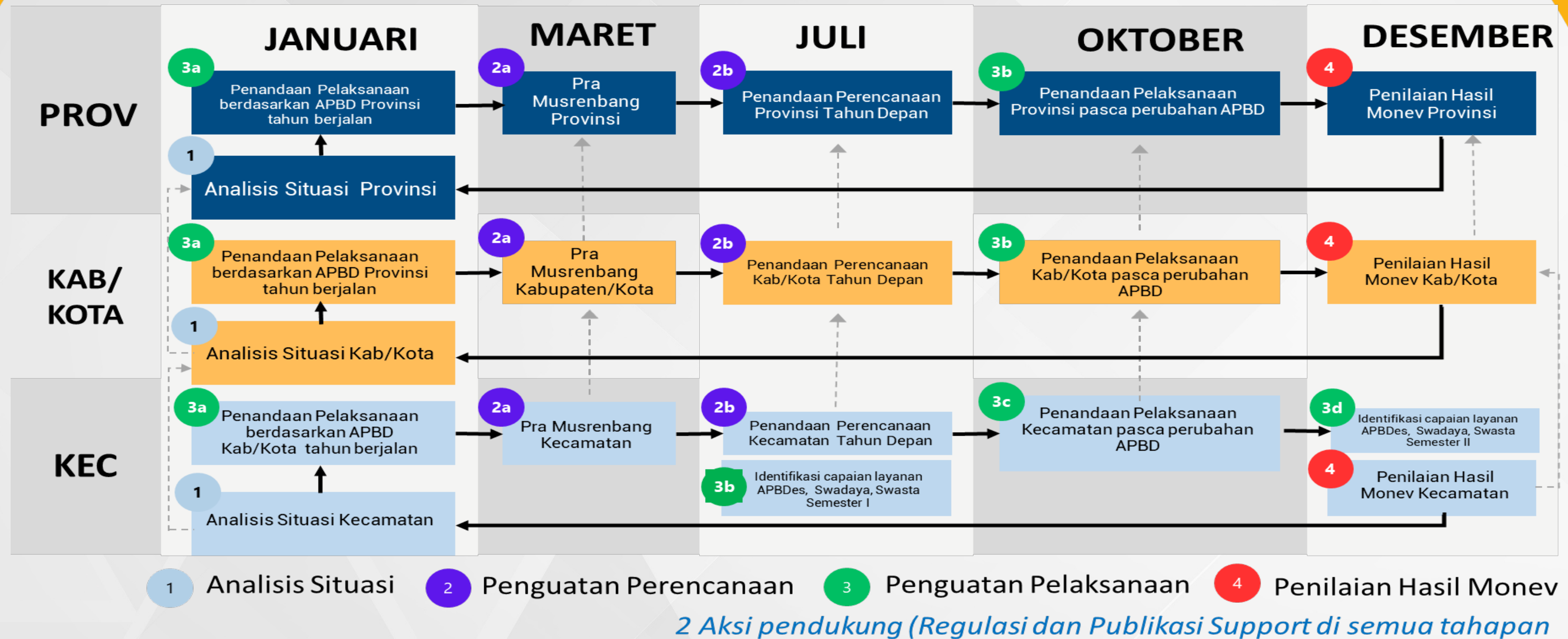
MEKANISME PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TAHUN ANGGARAN 2025



www.konvergensi.bangda.kemendagri.go.id



SIKLUS AKSI KONVERGENSI





• Kelompok Sasaran •



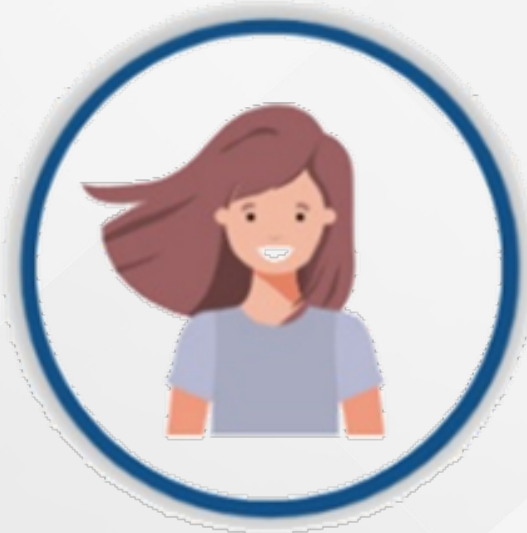
**IBU HAMIL, IBU
NIFAS DAN IBU
MENYUSUI**



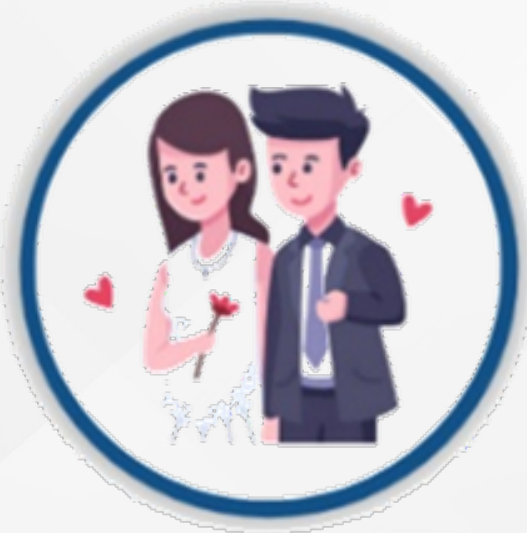
**ANAK USIA
0-23 BULAN
(BADUTA)**



**ANAK USIA
24-59 BULAN
(BALITA)**



**REMAJA
PUTRI
(REMATRI)**



**CALON
PENGANTIN
(CATIN)**



**RUMAH TANGGA
DAN MASYARAKAT**

INDIKATOR INTERVENSI KONVERGENSI DAERAH

IBU HAMIL, IBU NIFAS & IBU MENYUSUI	BADUTA USIA 0 – 23 BULAN	BALITA USIA 24 – 59 BULAN	REMAJA PUTRI	CALON PENGANTIN	RUMAH TANGGA & MASYARAKAT
1. Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK; 2. Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) sebanyak 180 butir selama masa kehamilan; 3. Makanan bergizi seimbang pada ibu hamil; 4. Pemeriksaan Kehamilan 6 kali selama masa kehamilan; 5. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.	1. Praktik Inisiasi Menyusui Dini; 2. Anak usia 0-5 bulan mendapatkan ASI Eksklusif; 3. Anak usia 6-23 bulan mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MPASI) beragam; 4. Anak usia 6-23 bulan yang masih mendapat ASI; 5. Anak usia 0-23 bulan gizi buruk mendapat tatalaksana gizi buruk; 6. Anak usia 0-23 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan; 7. Anak usia 0-23 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi; 8. Anak usia 0-23 bulan mendapatkan Imunisasi Rutin Lengkap; 9. Anak usia 0-23 bulan diare mendapatkan oralit dan zinc sesuai standar; 10. Anak usia 0-23 bulan mendapatkan obat cacing (POPM).	1. Anak usia 24-59 bulan gizi buruk mendapatkan tatalaksana gizi buruk; 2. Anak usia 24-59 bulan dipantau pertumbuhan dan perkembangan; 3. Anak usia 24-59 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi; 4. Anak usia 24-59 bulan diare mendapatkan oralit dan zinc sesuai standar; 5. Jumlah temuan kasus pneumonia pada anak usia 24-59 bulan; 6. Anak usia 24-59 bulan mendapatkan obat obat cacing (POPM).	1. Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) terhadap Remaja Putri 2. Skrining anemia terhadap Remaja Putri	1. Calon pengantin mendapatkan pemeriksaan kesehatan; 2. Calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	1. Rumah tangga mendapatkan akses terhadap Air Minum Aman; 2. Rumah tangga mendapatkan akses terhadap Sanitasi Aman; 3. Penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); 4. Kelompok sasaran mendapatkan pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK); 5. Anak mendapatkan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA); 6. Ketersediaan program pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan asupan gizi di desa dan kelurahan.

PERSIAPAN

PENETAPAN PETUGAS DATA

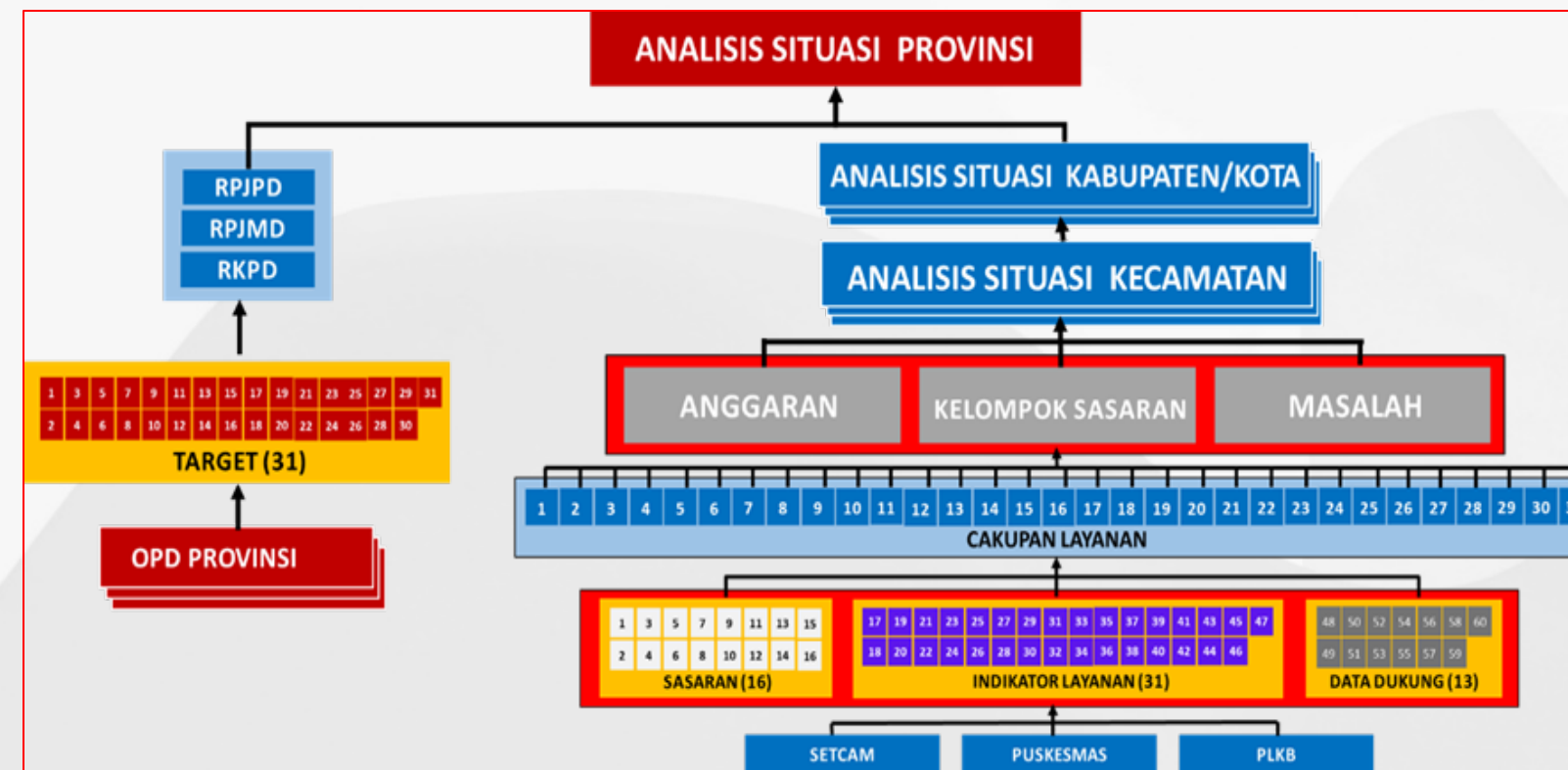
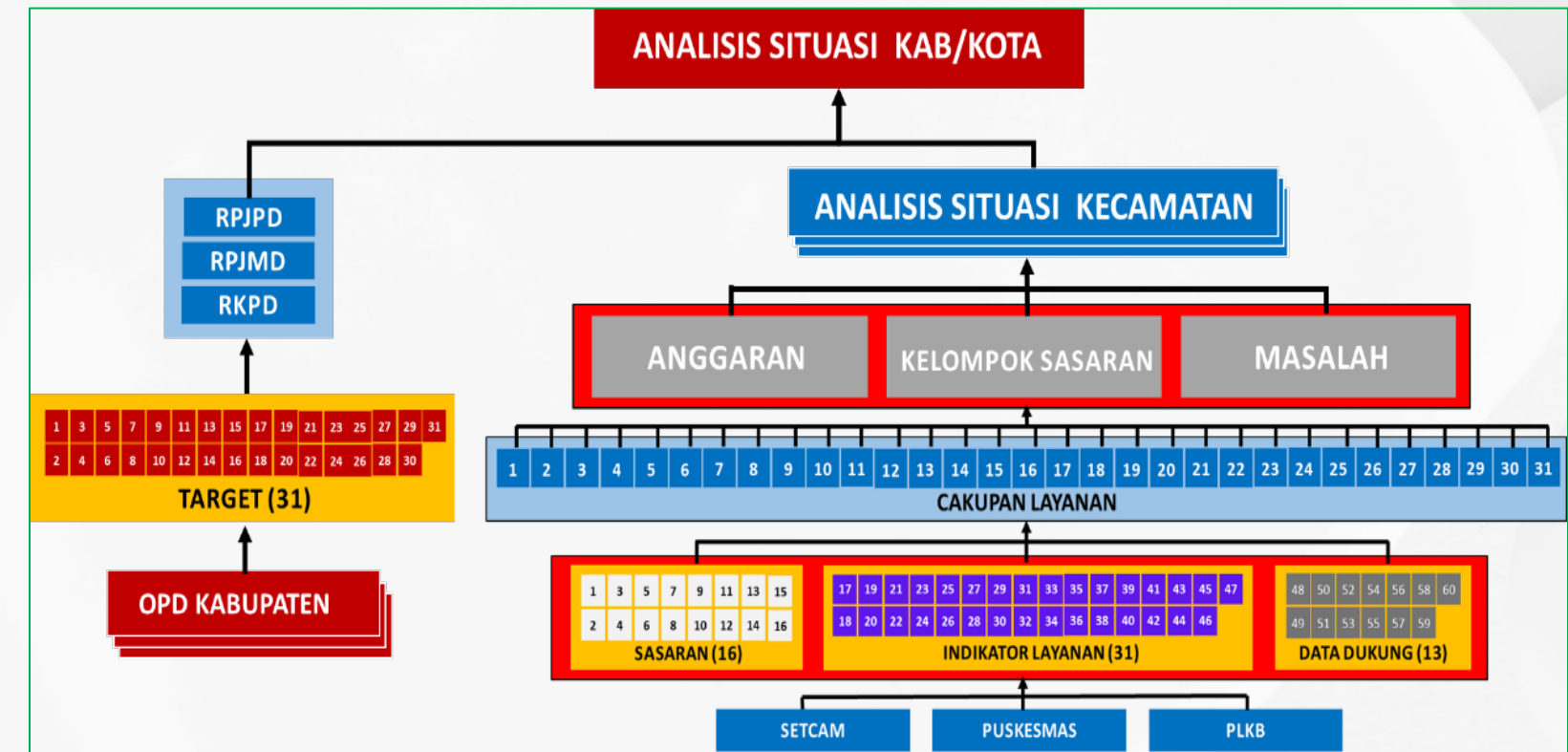
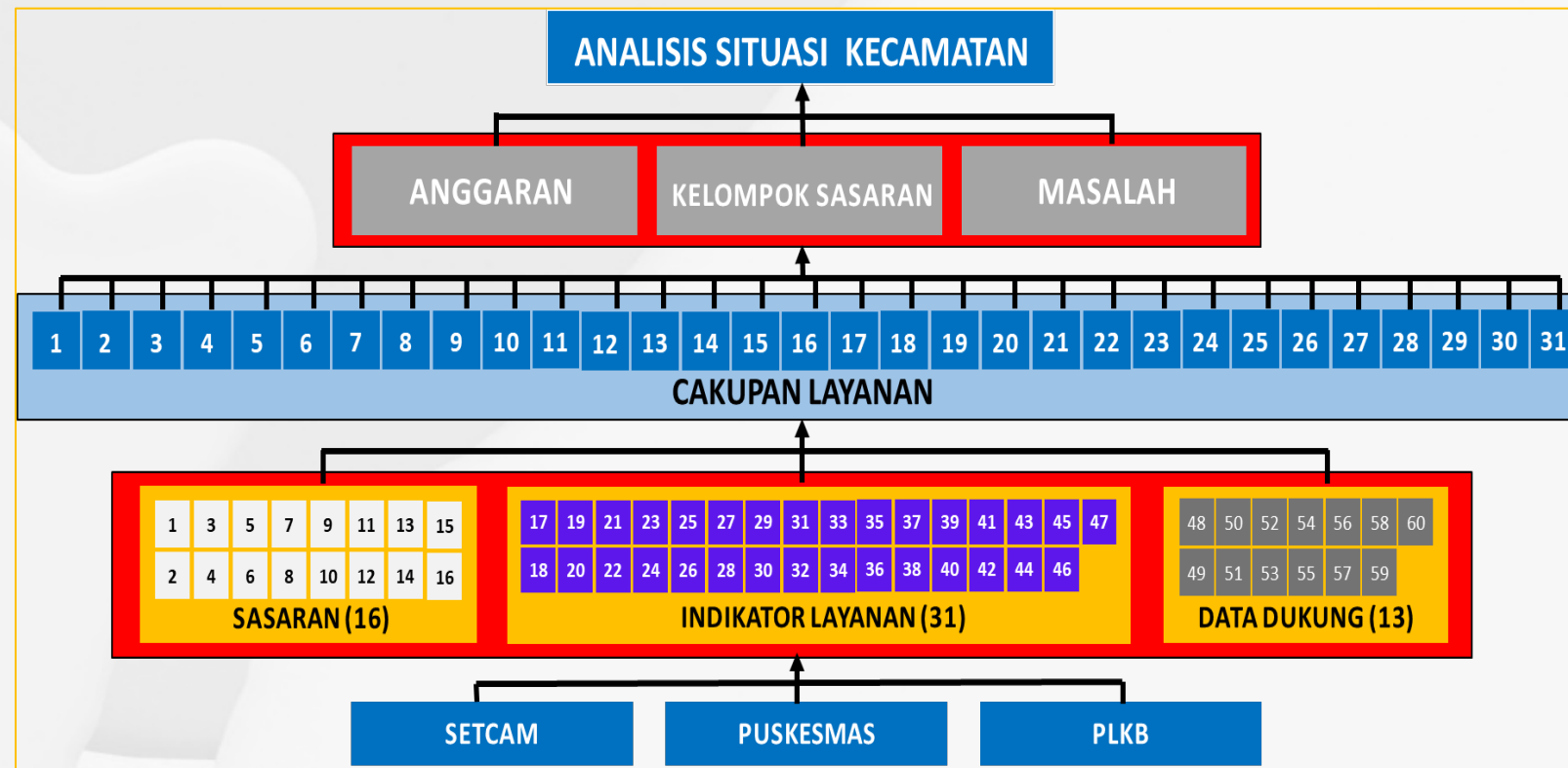
	OPERATOR Orang ditunjuk sebagai penghimpun dan penginput data untuk kebutuhan pelaksanaan aksi konvergensi pada web aksi bangsa	VERIFIKATOR Orang ditunjuk melakukan verifikasi atas data yang dihimpun dan diinput oleh operator menggunakan tools pada web aksi bangsa	APPROVER Orang yang bertugas untuk memberikan persetujuan data hasil verifikasi pada web aksi bangsa
KECAMATAN	1 (satu) orang dari Sekretariat Kecamatan 1 (satu) orang dari Puskesmas 1 (satu) orang dari PLKB	1 (satu) orang dari Sekretariat Kecamatan 1 (satu) orang dari Puskesmas 1 (satu) orang dari PLKB	Camat
KABUPATEN/KOTA	1 (satu) orang dari Bappeda 1 (satu) orang dari masing-masing perangkat daerah terkait (21 OPD)	1 (satu) orang dari Bappeda	Kepala Bappeda
PROVINSI	1 (satu) orang dari Bappeda 1 (satu) orang dari masing-masing perangkat daerah terkait (19 OPD)	1 (satu) orang dari Bappeda	Kepala Bappeda

ANALISIS SITUASI

proses mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis data serta informasi untuk memahami kondisi, tantangan, dan faktor-faktor penyebab stunting di suatu wilayah. Tujuan utamanya adalah menyediakan dasar yang kuat bagi perencanaan intervensi yang tepat sasaran, efektif, dan terintegrasi.



ANALISIS SITUASI



ANALISIS SITUASI KECAMATAN

1. Pengumpulan dan penginputan **data sasaran, capaian layanan** dan **data pendukung** berbasisan desa/kelurahan

No.	Sasaran	PJ Data
1	Jumlah Penduduk	Setcam
2	Jumlah Keluarga/Rumah Tangga	Setcam
3	Jumlah Remaja Putri	Setcam
4	Jumlah Ibu Hamil	Puskesmas
5	Jumlah Ibu Nifas	Puskesmas
6	Jumlah Calon Pengantin	PLKB
7	Jumlah Ibu Hamil KEK	Puskesmas
8	Jumlah Anak usia 0-5 bulan	Puskesmas
9	Jumlah Anak usia 6-23 bulan	Puskesmas
10	Jumlah Anak usia 24-59 bulan	Puskesmas
11	Jumlah kasus diare pada anak usia 0-59 bulan	Puskesmas
12	Jumlah Anak usia 0-23 bulan gizi buruk	Puskesmas
13	Jumlah Anak usia 0-23 bulan gizi kurang	Puskesmas
14	Jumlah Anak usia 24-59 bulan gizi buruk	Puskesmas
15	Jumlah Anak usia 24-59 bulan gizi kurang	Puskesmas
16	Jumlah Anak usia 0-17 tahun	Setcam

ANALISIS SITUASI KECAMATAN

1. Pengumpulan dan penginputan **data sasaran, capaian layanan** dan **data pendukung** berbasiskan desa/kelurahan

No.	Indikator	PJ data
Ibu hamil, ibu menyusui dan ibu nifas:		
1	Jumlah Ibu hamil KEK mendapat Makanan Tambahan	Puskesmas
2	Jumlah Ibu hamil menerima Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) sebanyak 180 butir selama masa kehamilan	Puskesmas
3	Jumlah Ibu hamil menerima makanan bergizi seimbang	Puskesmas
4	Jumlah Ibu hamil memeriksakan kehamilannya 6 kali selama masa kehamilan;	Puskesmas
5	Jumlah Ibu Nifas menerima pelayanan Keluarga Berencana (KB)	Puskesmas
Anak usia 0-23 bulan:		
1	Jumlah anak baru lahir yang mendapatkan inisiasi menyusui dini	Puskesmas
2	Jumlah anak usia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif	Puskesmas
3	Jumlah anak usia 6-23 bulan yang mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MPASI);	Puskesmas
4	Jumlah anak usia 6-23 bulan yang masih mendapat air susu ibu (ASI)	Puskesmas
5	Jumlah anak usia 0-23 bulan gizi buruk yang mendapatkan tatalaksana gizi buruk	Puskesmas
6	Jumlah anak usia 0-23 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Puskesmas
7	Jumlah anak usia 0-23 bulan gizi kurang yang mendapat asupan gizi	Puskesmas
8	Jumlah anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan imunisasi rutin lengkap	Puskesmas
9	Jumlah anak usia 0-23 bulan diare yang mendapatkan oralit dan zinc	Puskesmas
10	Jumlah anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan obat cacing;	Puskesmas

ANALISIS SITUASI KECAMATAN

1. Pengumpulan dan penginputan **data sasaran, capaian layanan** dan **data pendukung** berbasisan desa/kelurahan

No.	Indikator	PJ data
Anak usia 24-59 bulan:		
1	Jumlah anak usia 24-59 bulan gizi buruk yang mendapatkan pelayanan tata laksana gizi buruk	Puskesmas
2	Jumlah anak usia 24-59 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Puskesmas
3	Jumlah anak usia 24-59 bulan gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Puskesmas
4	Jumlah anak usia 24-59 bulan diare yang mendapatkan oralit dan zinc	Puskesmas
5	Jumlah temuan kasua pneumonia pada anak usia 24-59 bulan	Puskesmas
6	Jumlah anak usia 24-59 bulan yang mendapatkan obat cacing;	Puskesmas
Remaja Putri		
1	Jumlah Remaja Putri yang mengonsumsi TTD;	Puskesmas
2	Jumlah Remaja putri yang mendapatkan pemeriksaan anemia	Puskesmas
Calon Pengantin		
1	Jumlah Calon Pengantin yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan pra nikah	Puskesmas
2	Jumlah Calon Pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	PLKB

ANALISIS SITUASI KECAMATAN

1. Pengumpulan dan penginputan **data sasaran, capaian layanan** dan **data pendukung** berbasisan desa/kelurahan

No.	Indikator	PJ data
Rumah tangga dan masyarakat		
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap Air Minum Aman	Puskesmas
2	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap Sanitasi Aman	Puskesmas
3	Jumlah kelompok sasaran* Pendampingan keluarga 1000 HPK	PLKB
4	Jumlah penduduk yang memiliki JKN	Puskesmas
5	Jumlah Anak yang memiliki akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)	Setcam
6	Jumlah Desa dan Kelurahan yang melaksanakan program pemanfaatan pekarangan sebagai sumber peningkatan asupan gizi	Setcam
* kelompok sasaran meliputi: Ibu hamil, ibu nifas, anak usia 0-23 bulan, anak usia 23-59 bulan, remaja putri, calon pengantin		

ANALISIS SITUASI KECAMATAN

1. Pengumpulan dan penginputan **data sasaran, capaian layanan** dan **data pendukung** berbasiskan desa/kelurahan

No.	Data Pendukung Layanan	PJ Data
1	Jumlah Posyandu tiap desa/kelurahan	Puskesmas
2	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan Puskesmas Pembantu (Pustu)	Puskesmas
3	Jumlah klinik Kesehatan	Puskesmas
4	Jumlah Dokter	Puskesmas
5	Jumlah kader-kader kesehatan atau kader posyandu tiap desa/kelurahan	Puskesmas
6	Jumlah Bidan yang ada di desa/kelurahan	Puskesmas
7	Jumlah Petugas Gizi	Puskesmas
8	Jumlah Sanitarian	Puskesmas
9	Jumlah tenaga promosi Kesehatan	Puskesmas
10	Jumlah lembaga PAUD	Setcam
11	Jumlah SMP/MTs atau yang setara	Setcam
12	Jumlah SMA/MA atau yang setara	Setcam
13	Jumlah Guru PAUD	Setcam

ANALISIS SITUASI KECAMATAN

2. inventarisasi dan pemetaan program/kegiatan intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang berjalan di kecamatan

No.	Indikator	Program/ Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran	Sumber Dana	Pelaksana	Lokasi
1	31 indikator	Nama Program/Kegiatan						

Penanggung Jawab Sekretariat Kecamatan

ANALISIS SITUASI

URAIAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
Tujuan	Analisis situasi kecamatan adalah dokumen yang berisi hasil analisis tentang cakupan layanan, anggaran, serta masalah yang dihadapi dalam upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di desa dan/atau kelurahan dalam wilayah kecamatan yang meliputi cakupan layanan, kelompok sasaran, penyebab masalah dan solusinya sebagai program prioritas.	Analisis situasi merupakan analisis lintas sektor untuk memahami perkembangan prevalensi stunting, pola sebaran prevalensi stunting, dan mengidentifikasi penyebabnya berdasarkan analisis penyebab kesenjangan layanan dan analisis kendala dalam penyampaian layanan bagi kelompok sasaran secara lengkap dan konvergen.	Analisis situasi merupakan analisis lintas sektor untuk memahami perkembangan prevalensi stunting, pola sebaran prevalensi stunting, dan mengidentifikasi penyebabnya berdasarkan analisis penyebab kesenjangan layanan dan analisis kendala dalam penyampaian layanan bagi kelompok sasaran secara lengkap dan konvergen.
Keluaran	Dokumen hasil analisis tentang kondisi layanan, kelompok sasaran, alokasi anggaran, permasalahan yang dihadapi, dan rekomendasi serta rencana program/kegiatan dalam upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di desa dan/atau kelurahan dalam wilayah kecamatan	Dokumen hasil analisis tentang target dan capaian anggaran, cakupan layanan serta masalah yang dihadapi dalam upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota yang meliputi indikator, kelompok sasaran, penyebab masalah dan solusinya sebagai program prioritas	Dokumen hasil analisis tentang target dan capaian anggaran, cakupan layanan serta masalah yang dihadapi dalam upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang meliputi indikator, kelompok sasaran, penyebab masalah dan solusinya sebagai program prioritas



ANALISIS SITUASI

URAIAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
Langkah-langkah	1. Pengumpulan dan penginputan data sasaran, capaian layanan dan data pendukung berdasarkan desa/kelurahan 2. inventarisasi dan pemetaan program/kegiatan intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang berjalan di kecamatan 3. identifikasi permasalahan dan kendala capaian layanan baik dari sisi penerima layanan, ketersediaan maupun tata kelola 4. rekomendasi perbaikan intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting 5. usulan program/kegiatan intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	1. Input data hasil pengukuran balita bulan Agustus tahun sebelumnya. 2. input target prevalensi stunting sesuai dengan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 3. input target capaian layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. 4. Rapat terpadu lintas perangkat daerah untuk mereview perkembangan prevalensi stunting, dan cakupan intervensi gizi 5. Rapat internal perangkat daerah penanggung jawab pelaksanaan intervensi gizi	1. Input data hasil pengukuran balita bulan Agustus tahun sebelumnya. 2. input target prevalensi stunting sesuai dengan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 3. input target capaian layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. 4. Rapat terpadu lintas perangkat daerah untuk mereview perkembangan prevalensi stunting, dan cakupan intervensi gizi 5. Rapat internal perangkat daerah penanggung jawab pelaksanaan intervensi gizi
Pelaksana	Camat, Puskesmas, PLKB dan OPD di kecamatan lainnya	Bappeda dan Perangkat Daerah Penanggungjawab indikator layanan	Bappeda dan Perangkat Daerah Penanggungjawab indikator layanan
Waktu	Januari	Februari	Maret

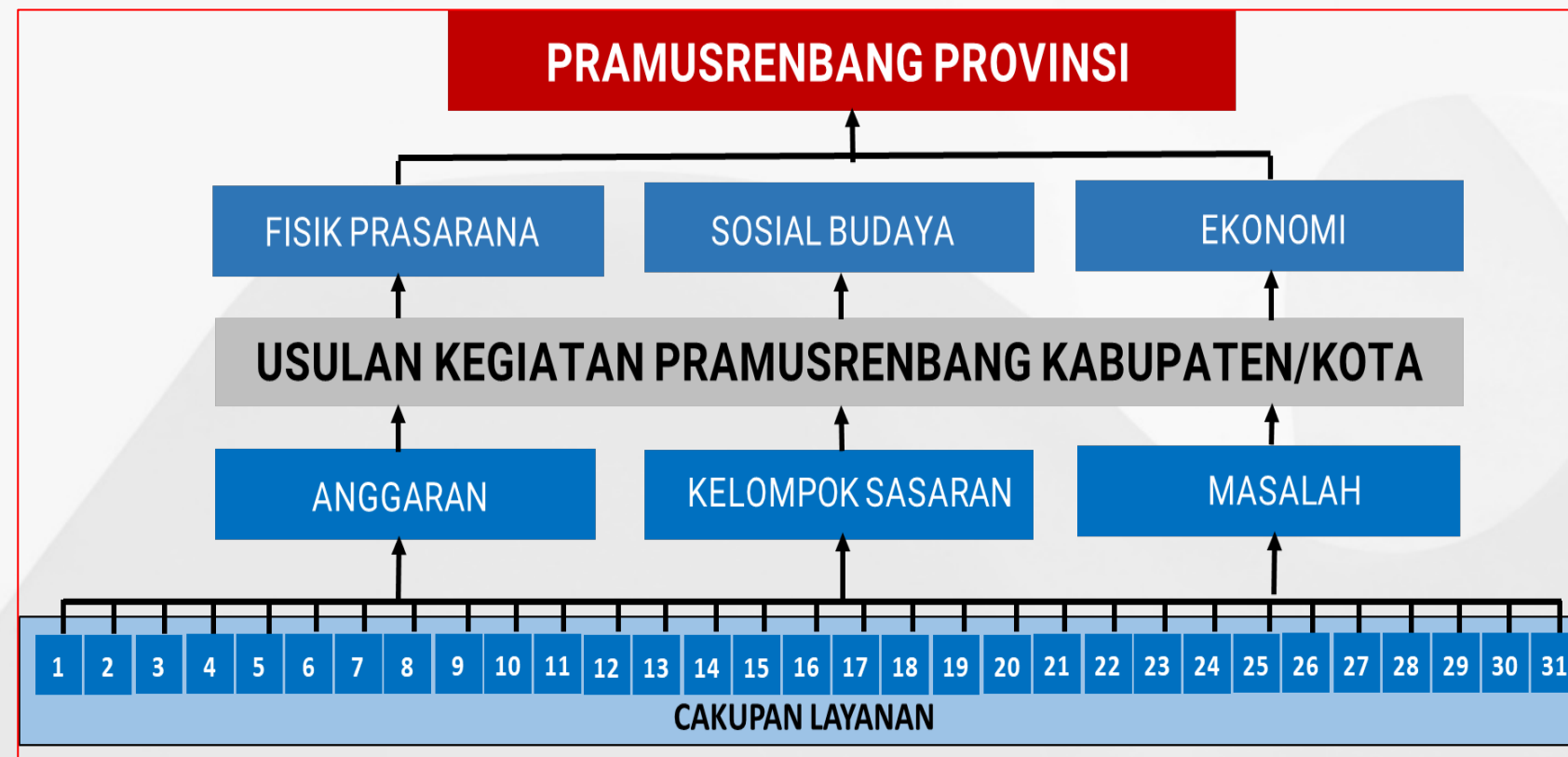
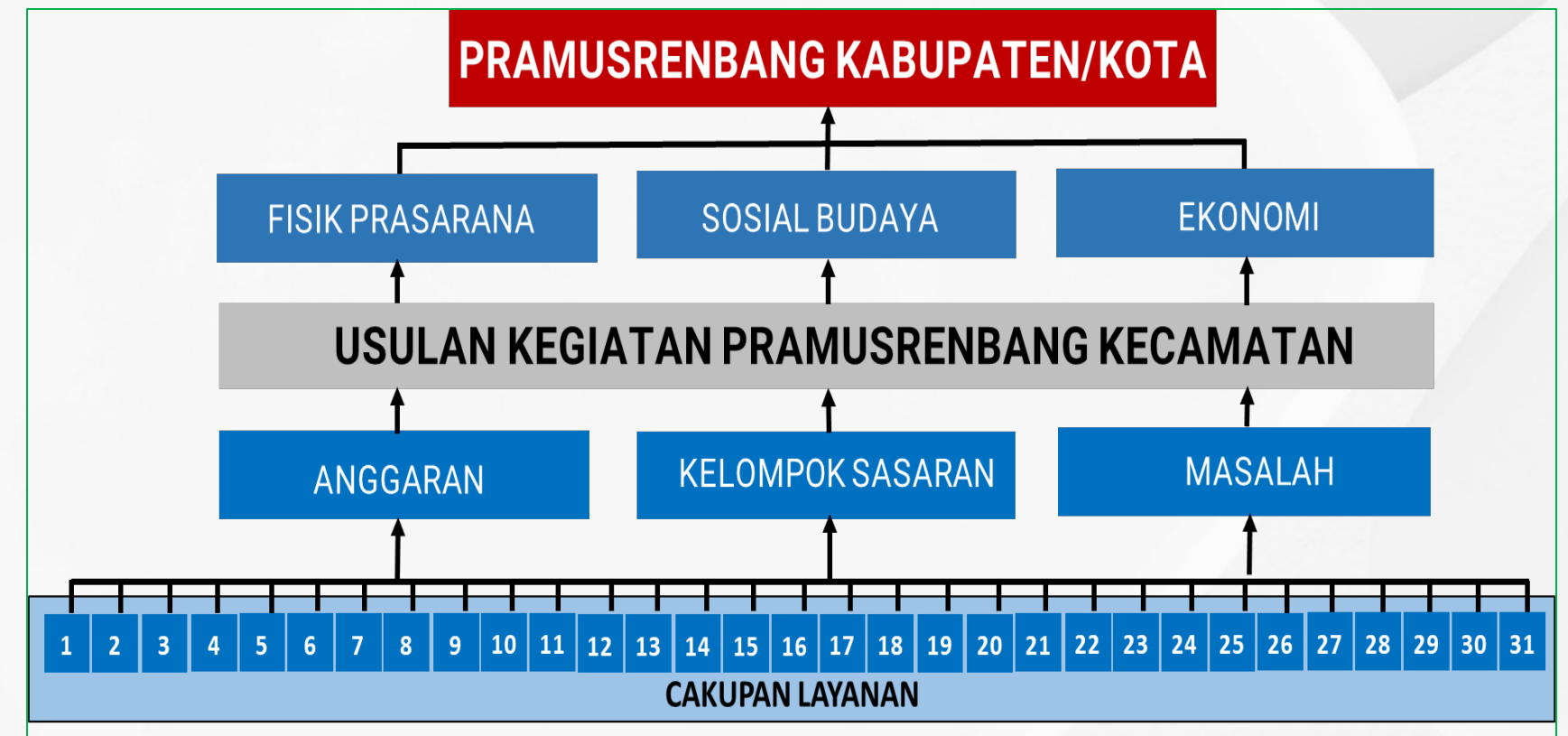
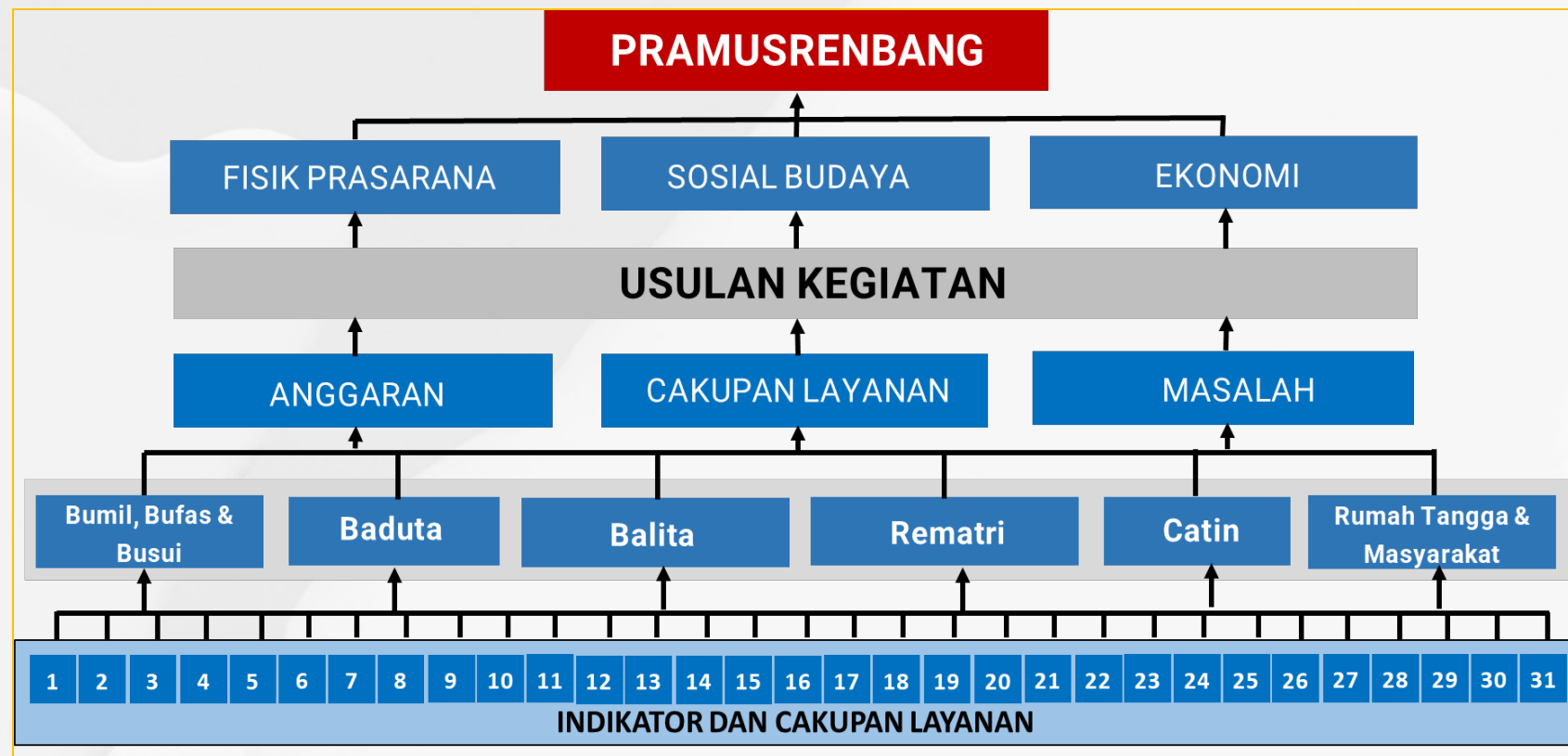


PENGUATAN PERENCANAAN

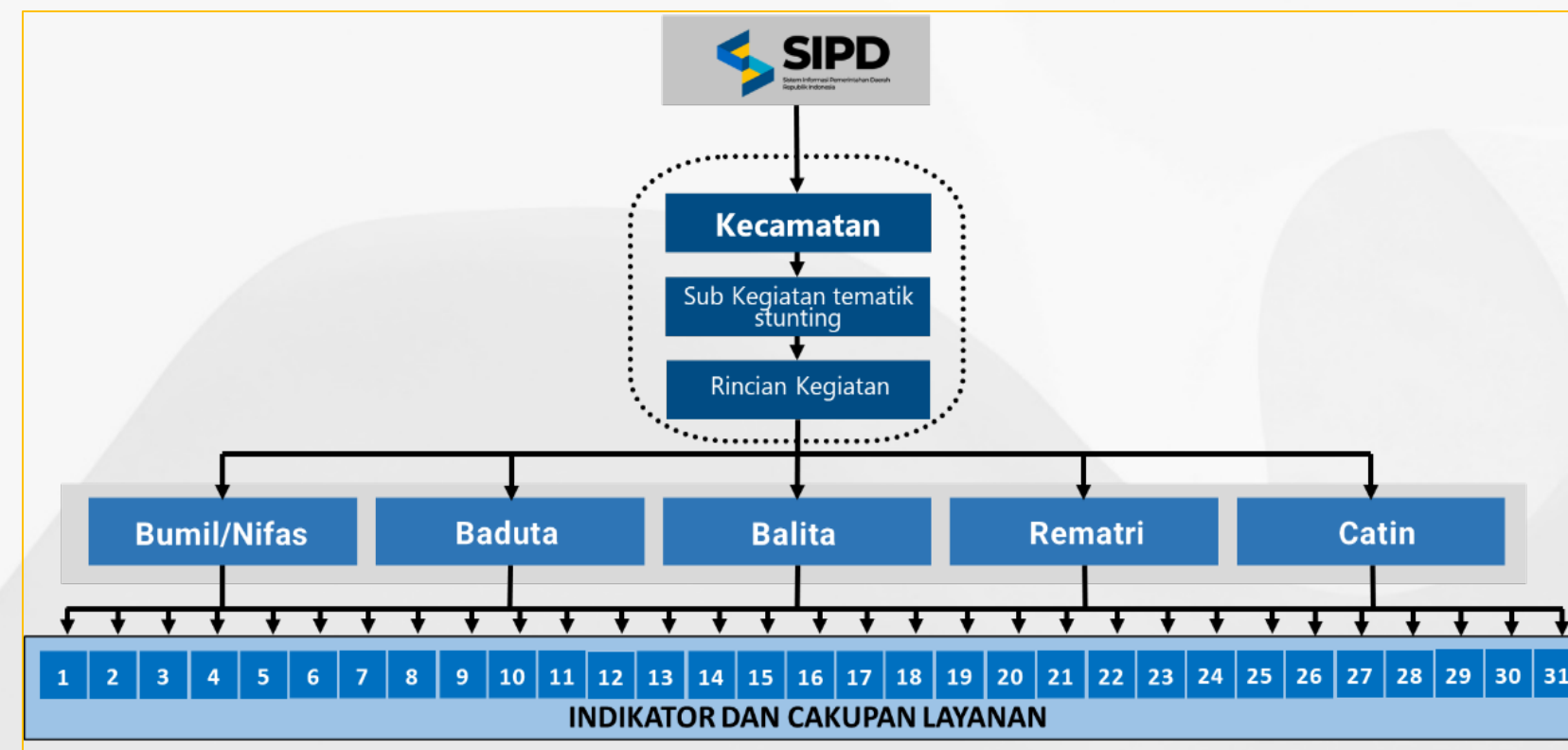
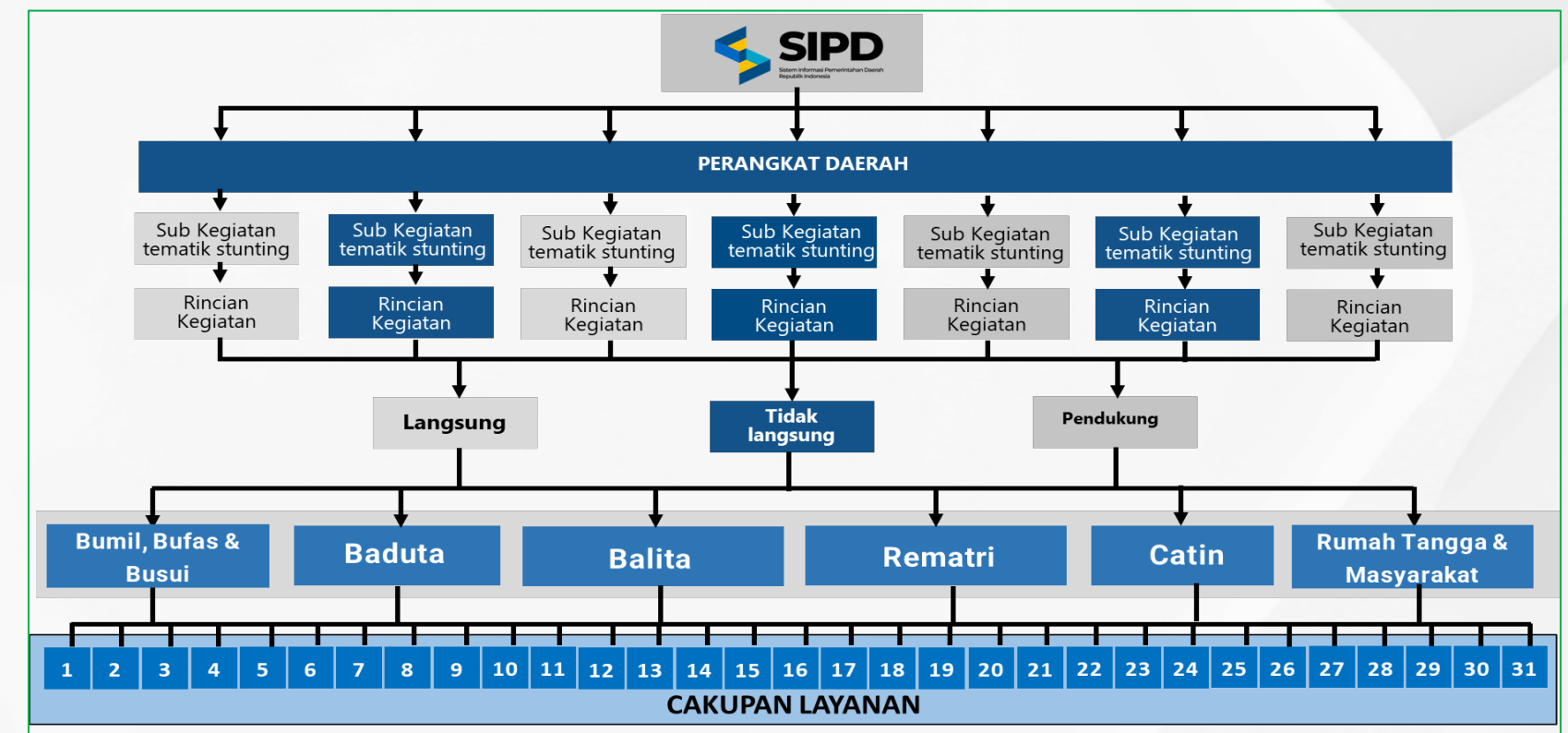
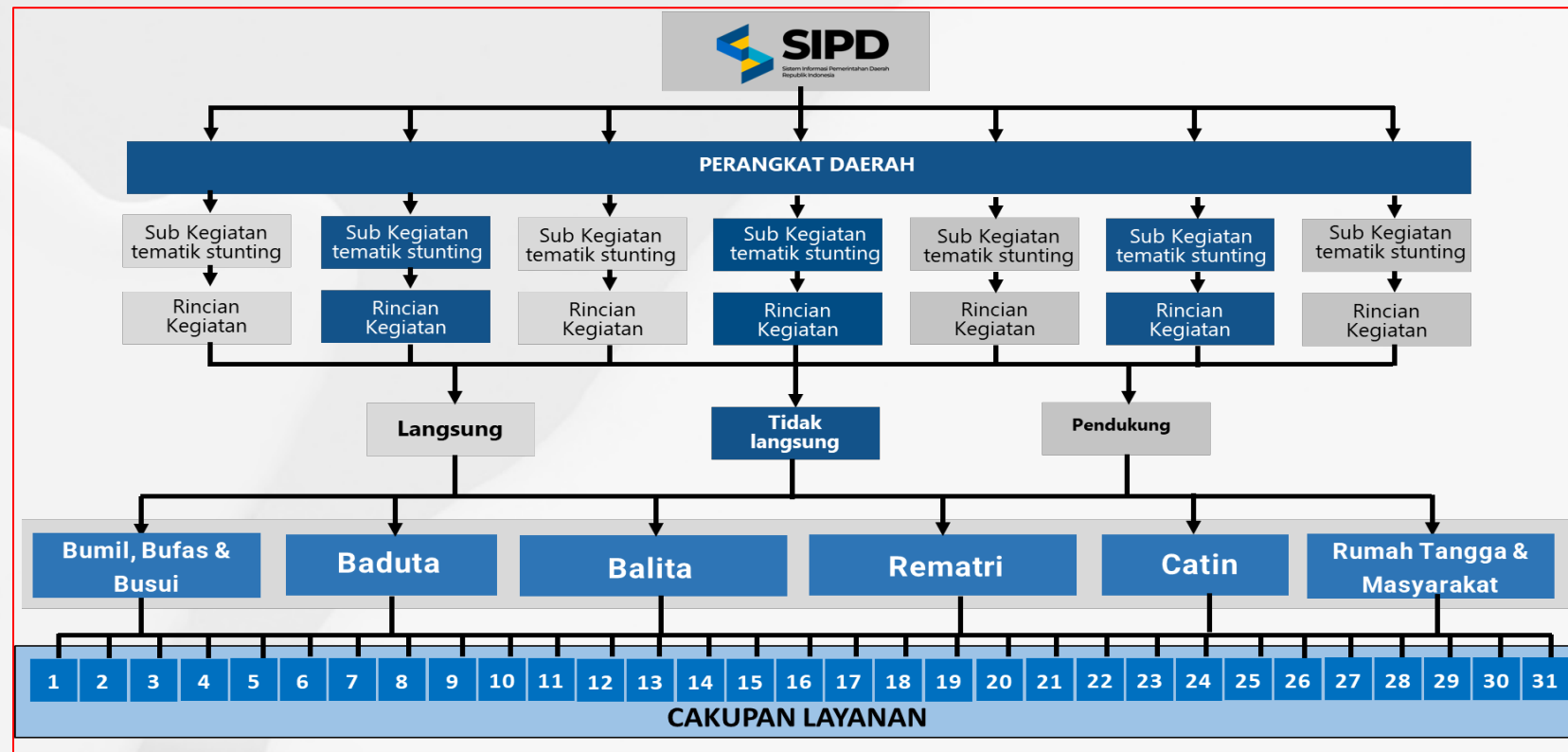
memastikan bahwa setiap tahapan perencanaan pembangunan—from identifikasi masalah, penetapan prioritas, hingga penganggaran—secara khusus memasukkan dan mengutamakan intervensi yang relevan untuk menurunkan angka stunting. Tujuan utamanya adalah agar program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota benar-benar menjawab akar masalah stunting secara terukur, terarah, dan terintegrasi lintas sektor.



PRA MUSRENBANG TEMATIK STUNTING



PENANDAAN PERENCANAAN TAHUN DEPAN



PENGUATAN PERENCANAAN

URAIAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
1. PRA-MUSRENBANG			
Tujuan	forum pertemuan antar stakeholders di tingkat kecamatan dalam rangka membahas masalah, potensi serta kebutuhan program/kegiatan dalam upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, berdasarkan data-data hasil analisis situasi serta penandaan/tagging anggaran program/kegiatan berdasarkan APBD Kab/Kota tahun berjalan.	forum pertemuan antar stakeholders di tingkat kabupaten/kota untuk mengevaluasi pencapaian dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di wilayah kabupaten/kota, usulan program/kegiatan intervensi dan mengapresiasi peran, kinerja dari berbagai lembaga/pelaku dan desa/kelurahan	forum pertemuan antar stakeholders di tingkat provinsi untuk mengevaluasi pencapaian dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di wilayah provinsi, usulan program/kegiatan intervensi dan mengapresiasi peran, kinerja dari berbagai lembaga/pelaku.
Keluaran	- Dokumen yang berisi daftar rencana program/kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting hasil pra-musrenbang kecamatan yang terbagi dalam bidang fisik prasarana, sosial budaya dan ekonomi di desa dan/atau kelurahan dalam wilayah kecamatan berdasarkan hasil dari analisis situasi kecamatan. - Berita Acara Hasil Pra Musrenbang Kecamatan tematik stunting.	- Dokumen yang berisi daftar rencana program/kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting hasil pra-musrenbang kabupaten/kota yang terbagi dalam bidang fisik prasarana, sosial budaya dan ekonomi berdasarkan hasil dari analisis situasi seluruh kecamatan dalam kabupaten/kota dan analisis situasi kabupaten/kota. - Berita Acara hasil pra-musrenbang kabupaten/kota tematik stunting	- Dokumen yang berisi daftar rencana program/kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting hasil pra-musrenbang kabupaten/kota yang terbagi dalam bidang fisik prasarana, sosial budaya dan ekonomi berdasarkan hasil dari analisis situasi seluruh kecamatan dalam kabupaten/kota dan analisis situasi kabupaten/kota. - Berita Acara hasil pra-musrenbang kabupaten/kota tematik stunting.



PENGUATAN PERENCANAAN

URAIAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
1. PRA-MUSRENBANG			
Agenda	1. Kendala, masalah serta keberhasilan ketercapaian layanan; 2. Program/kegiatan pemenuhan layanan serta penetapan prioritas intervensi; 3. Rencana program/kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting tahun depan; 4. Pemilahan rencana program/kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dalam dilakukan klasifikasi dalam kategori Fisik Prasarana, Sosial Budaya dan Ekonomi	1. Melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah kabupaten/kota dalam percepatan pencegahan/penurunan stunting berdasarkan hasil analisis situasi. 2. Merumuskan usulan program/kegiatan intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. 3. Melakukan pemilahan usulan program/kegiatan intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dalam kategori Fisik Prasarana, Sosial budaya dan Ekonomi. 4. Mendeklarasikan komitmen pimpinan kabupaten/kota, DPRD, pimpinan OPD, kecamatan, desa/kelurahan dan pemangku kepentingan lainnya untuk merealisasikan rencana kegiatan percepatan pencegahan/penurunan stunting. 5. Memberikan apresiasi kepada perangkat daerah/lembaga/pelaku yang dinilai berkinerja baik dalam mendukung kabupaten/kota meningkatkan cakupan, kualitas, dan konvergensi intervensi gizi.	1. Melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah provinsi dalam percepatan pencegahan/penurunan stunting berdasarkan hasil analisis situasi. 2. Merumuskan usulan program/kegiatan intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. 3. Melakukan pemilahan usulan program/kegiatan intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dalam kategori Fisik Prasarana, Sosial budaya dan Ekonomi. 4. Mendeklarasikan komitmen pimpinan provinsi, DPRD, pimpinan OPD, perwakilan kabupaten/kotadan pemangku kepentingan lainnya untuk merealisasikan rencana kegiatan percepatan pencegahan/penurunan stunting. 5. Memberikan apresiasi kepada perangkat daerah/lembaga/pelaku yang dinilai berkinerja baik dalam mendukung kabupaten/kota meningkatkan cakupan, kualitas, dan konvergensi intervensi gizi.



PENGUATAN PERENCANAAN

URAIAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
1. PRA-MUSRENBANG			
Pelaksana	1. Camat (koordinator) 2. Pemangku kepentingan lainnya	1. Bappeda (koordinator) 2. Pemangku kepentingan lainnya	1. Bappeda (koordinator) 2. Pemangku kepentingan lainnya
Waktu	Februari	Maret	April
2. PENANDAAN DALAM RKPD TAHUN DEPAN			
Tujuan	Penandaan perencanaan kecamatan tahun depan merupakan bagian dari tahapan penguatan perencanaan percepatan penurunan stunting, yang bertujuan untuk memastikan usulan hasil pra musrenbang kecamatan teralokasi dalam rencana anggaran Tahun depan	Penandaan perencanaan kabupaten/Kota tahun depan merupakan bagian tahapan penguatan perencanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka memastikan hasil rumusan usulan kegiatan tahun depan dalam pra-musrenbang kab/kota terakomodir dalam rencana anggaran tahun depan	Penandaan perencanaan Provinsi tahun depan merupakan bagian tahapan penguatan perencanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka memastikan hasil rumusan usulan kegiatan tahun depan dalam pra-musrenbang provinsi terakomodir dalam rencana anggaran tahun depan



PENGUATAN PERENCANAAN

URAIAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
2. PENANDAAN DALAM RKPD TAHUN DEPAN			
Langkah	1. penandaan usulan program/kegiatan hasil pra musrenbang yang terakomodir dalam subkegiatan yang ada dalam rencana anggaran tahun depan yang tertuang dalam SIPD perencanaan. 2. penandaan terhadap belanja/aktifitas pada akun belanja yang ditujukan kepada sasaran, layanan maupun kegiatan bimbingan dan pengawasan	1. Bappeda melakukan konsolidasi antar sektor melalui desk perencanaan dan penganggaran 2. Perangkat Daerah melakukan penandaan rumusan usulan program/kegiatan hasil pra-musrenbang kabupaten/kota dengan dokumen rencana anggaran tahun depan yang tertuang dalam SIPD perencanaan 3. penandaan terhadap belanja/aktifitas pada akun belanja yang ditujukan kepada sasaran, layanan maupun kegiatan bimbingan dan pengawasan	1. Bappeda melakukan konsolidasi antar sektor melalui desk perencanaan dan penganggaran 2. Perangkat Daerah melakukan penandaan rumusan usulan program/kegiatan hasil pra-musrenbang kabupaten/kota dengan dokumen rencana anggaran tahun depan yang tertuang dalam SIPD perencanaan 3. penandaan terhadap belanja/aktifitas pada akun belanja yang ditujukan kepada sasaran, layanan maupun kegiatan bimbingan dan pengawasan
Waktu	Juli	Juli	Juli
Pelaksana	Camat (Operator kecamatan, verifikator dan Camat)	Bappeda dan perangkat daerah penanggungjawab intervensi	Bappeda dan perangkat daerah provinsi penanggungjawab intervensi

PENGUATAN PERENCANAAN

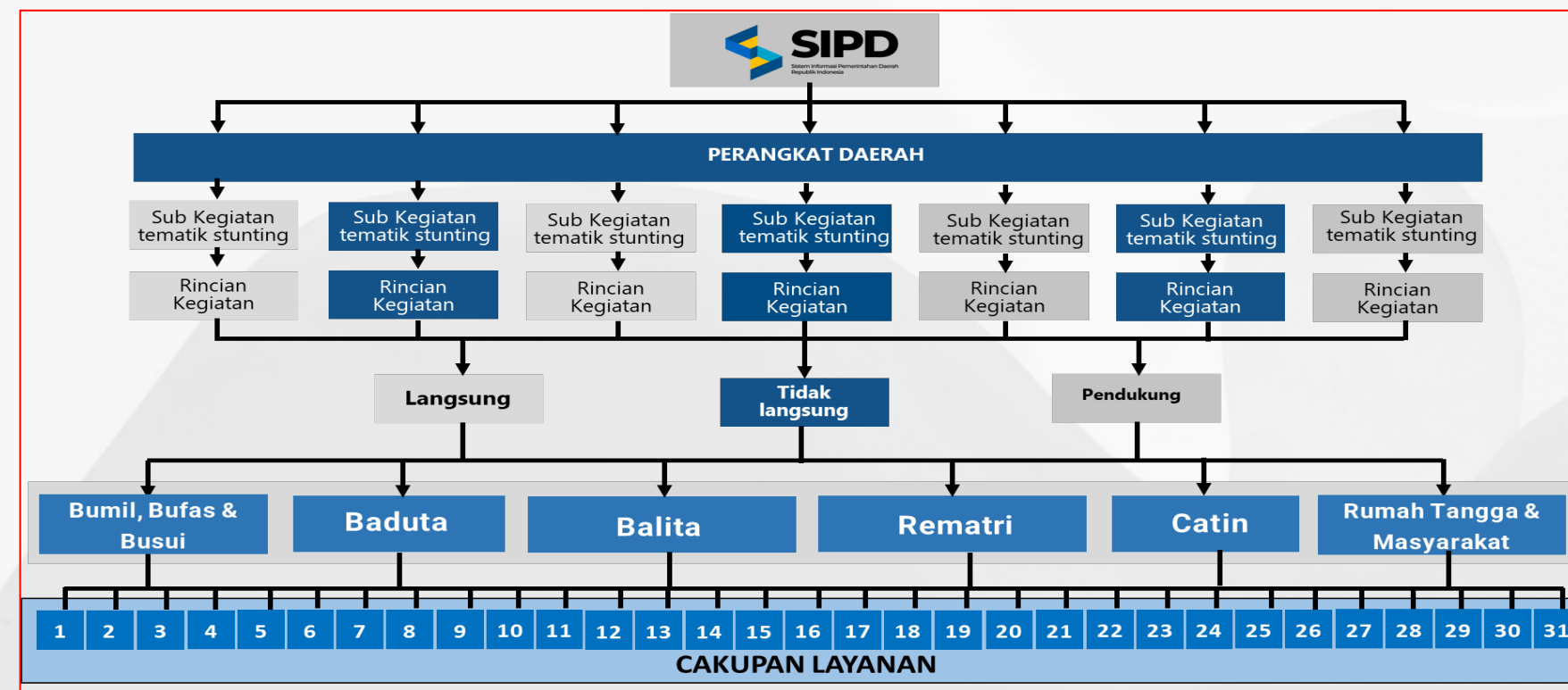
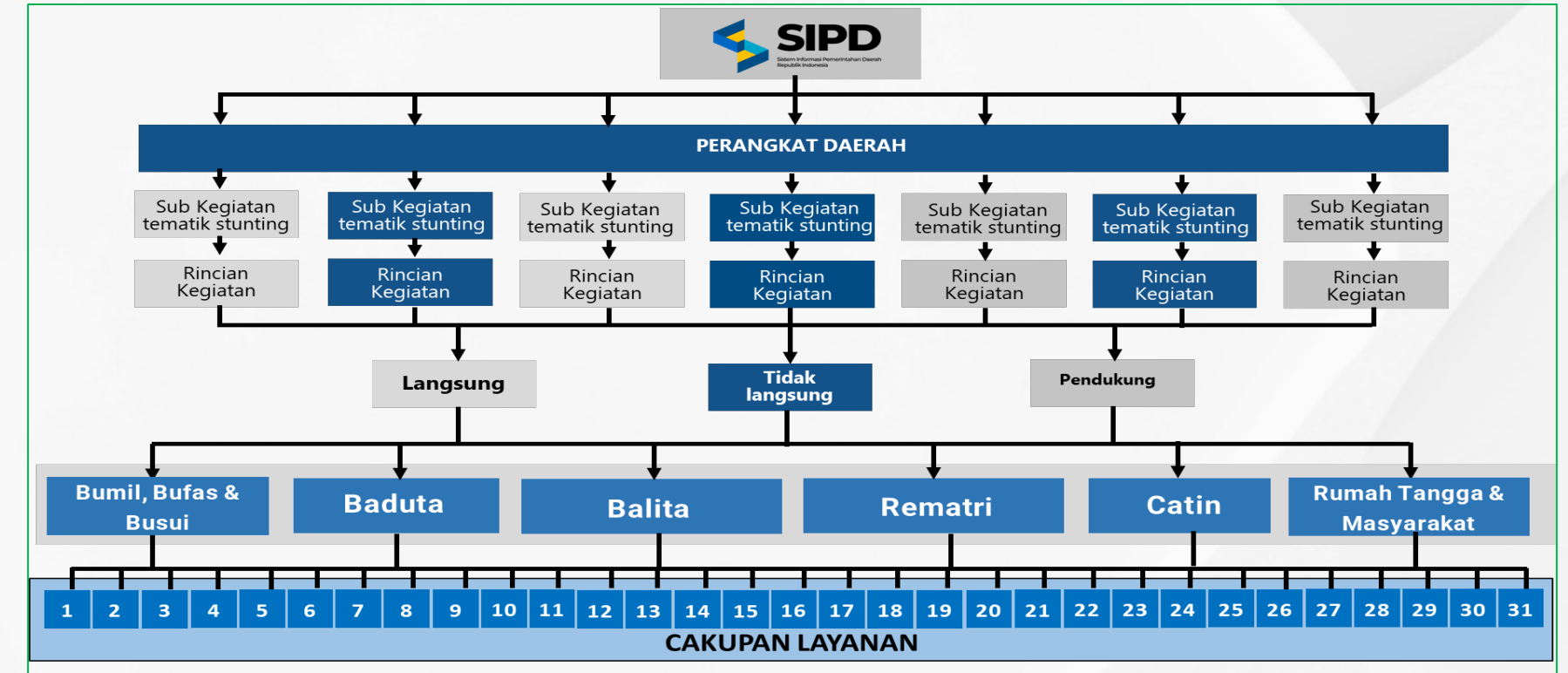
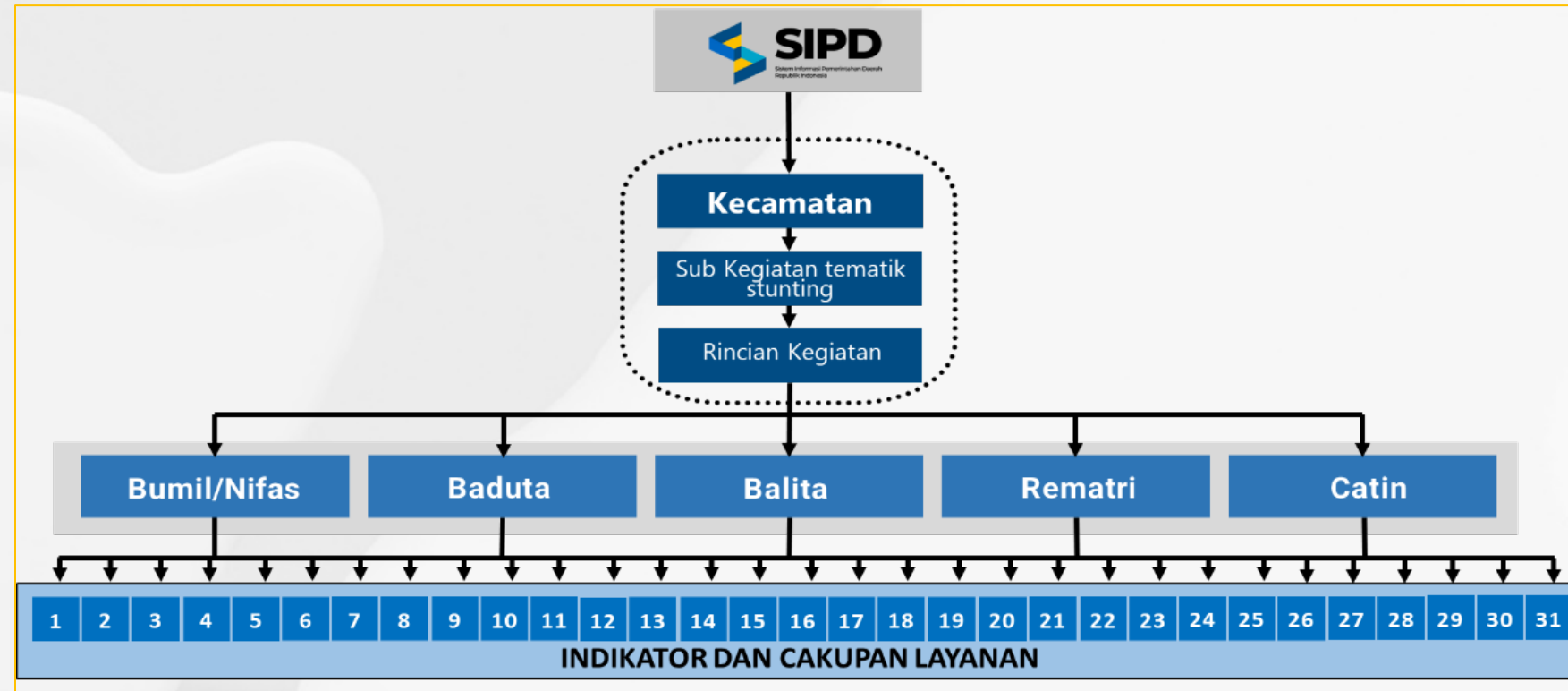
URAIAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
2. PENANDAAN DALAM RKPD TAHUN DEPAN			
Keluaran	Dokumen hasil penandaan rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan dari Subkegiatan tematik stunting dalam rencana anggaran kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam SIPD perencanaan yang menjadi kewenangan kecamatan.	Dokumen hasil penandaan rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan dari Subkegiatan tematik dalam rencana anggaran kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam SIPD perencanaan pada perangkat daerah kabupaten/kota tertentu	Dokumen hasil penandaan rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan dari Subkegiatan tematik dalam rencana anggaran provinsi sebagaimana tertuang dalam SIPD perencanaan pada perangkat daerah provinsi tertentu



PENGUATAN PELAKSANAAN

Memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan intervensi yang telah direncanakan benar-benar terlaksana di lapangan secara efektif, terkoordinasi, dan berdampak nyata pada penurunan prevalensi stunting.

PENANDAAN DAN PERUBAHAN APBD TAHUN BERJALAN



IDENTIFIKASI CAPAIAN LAYANAN DAN REALISASI KEGIATAN APBDES, SWADAYA DAN SWASTA SEMESTER 1



PENGUATAN PELAKSANAAN

URAIAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
1. PENANDAAN PROGRAM/KEGIATAN APBD KAB/KOTA TAHUN BERJALAN			
Tujuan	Penandaan rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan Subkegiatan tematik stunting dalam APBD sebagaimana tertuang dalam SIPD pelaksanaan	Penandaan Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Tahun berjalan bertujuan melakukan penandaan rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan Subkegiatan tematik stunting dalam APBD Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam SIPD pelaksanaan	Penandaan Pelaksanaan APBD Provinsi Tahun berjalan bertujuan melakukan penandaan rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan Subkegiatan tematik stunting dalam APBD Provinsi sebagaimana tertuang dalam SIPD pelaksanaan
Langkah	- Identifikasi program/kegiatan dari sub-kegiatan dalam dokumen penganggaran daerah (APBD Kabupaten/Kota) tahun berjalan yang menjadi kewenangan kecamatan dan kelurahan dari SIPD pelaksanaan - rincian belanja atau aktivitas yang ditujukan untuk sasaran dan pencapaian layanan percepatan pencegahan serta penurunan stunting.	- Bappeda melakukan konsolidasi antar sektor melalui desk perencanaan dan penganggaran yang mendukung penurunan stunting tahun anggaran berjalan berdasarkan dokumen SIPD - masing-masing Perangkat Daerah melakukan penandaan rincian belanja/aktifitas pada kegiatan/subkegiatan tematik stunting 4. Bappeda mengkoordinir konsolidasi lintas sektor dalam rangka reviu dukungan anggaran penurunan Stunting tahun berjalan	- Bappeda melakukan konsolidasi antar sektor melalui desk perencanaan dan penganggaran yang mendukung penurunan stunting tahun anggaran berjalan berdasarkan dokumen SIPD - masing-masing Perangkat Daerah melakukan penandaan rincian belanja/aktifitas pada kegiatan/subkegiatan tematik stunting - Bappeda mengkoordinir konsolidasi lintas sektor dalam rangka reviu dukungan anggaran penurunan Stunting tahun berjalan

PENGUATAN PELAKSANAAN

URAIAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
1. PENANDAAN PROGRAM/KEGIATAN APBD KAB/KOTA TAHUN BERJALAN			
Waktu	Januari	Februari	Februari
Pelaksana	Operator kecamatan, verifikator kecamatan dan Camat	Bappeda dan Perangkat daerah pengampun layanan, dan kantor perwakilan pusat di daerah	Bappeda dan Perangkat daerah pengampun layanan, dan kantor perwakilan pusat di daerah
Keluaran	Dokumen yang berisi hasil penandaan rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan Subkegiatan tematik stunting dalam APBD sebagaimana tertuang dalam SIPD pelaksanaan	Dokumen yang berisi hasil penandaan rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan Subkegiatan tematik stunting dalam APBD tahun berjalan sebagaimana tertuang dalam SIPD pelaksanaan	Dokumen yang berisi hasil penandaan rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan Subkegiatan tematik stunting dalam APBD sebagaimana tertuang dalam SIPD pelaksanaan

PENGUATAN PELAKSANAAN

URAIAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
2. PENANDAAN PELAKSANAAN PROVINSI PASCA PERUBAHAN APBD			
Tujuan	bertujuan untuk melakukan penandaan anggaran dan pemetaan program/kegiatan tahun berjalan setelah adanya APBD Perubahan sebagaimana tertuang dalam SIPD pelaksanaan	bertujuan untuk melakukan penandaan anggaran dan pemetaan program/kegiatan tahun berjalan setelah adanya APBD Perubahan	bertujuan untuk melakukan penandaan anggaran dan pemetaan program/kegiatan tahun berjalan setelah adanya APBD Perubahan
Langkah	1. Identifikasi program/kegiatan dari sub-kegiatan dalam APBD Perubahan yang menjadi kewenangan kecamatan dan kelurahan dari dokumen SIPD pelaksanaan. 2. Memilah rincian belanja atau aktivitas yang ditujukan untuk sasaran dan pencapaian layanan percepatan pencegahan serta penurunan stunting	1. Bappeda dan perangkat daerah penanggungjawab intervensi melakukan penandaan/tagging berdasarkan kode belanja terkait program/kegiatan percepatan penurunan dan pencegahan stunting yang bersumber dari APBD tahun berjalan. 2. pemilahan terhadap program/kegiatan yang mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan dalam APBD Perubahan. 3. penandaan/tagging meliputi kode rekening belanja, uraian belanja, koefisien/volume, satuan, harga satuan serta total belanja dan di input dalam web aksi bangda terhadap perubahan dimaksud	1. Bappeda dan perangkat daerah penanggungjawab intervensi melakukan penandaan/tagging berdasarkan kode belanja terkait program/kegiatan percepatan penurunan dan pencegahan stunting yang bersumber dari APBD tahun berjalan. 2. pemilahan terhadap program/kegiatan yang mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan dalam APBD Perubahan. 3. penandaan/tagging meliputi kode rekening belanja, uraian belanja, koefisien/volume, satuan, harga satuan serta total belanja dan di input dalam web aksi bangda terhadap perubahan dimaksud

PENGUATAN PELAKSANAAN

URAIAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
2. PENANDAAN PELAKSANAAN PROVINSI PASCA PERUBAHAN APBD			
Waktu	Oktober	Oktober	Oktober
Pelaksana	Operator kecamatan, verifikator kecamatan dan Camat	Bappeda dan perangkat daerah penanggungjawab intervensi	Bappeda dan perangkat daerah penanggungjawab intervensi
Keluaran	Dokumen yang berisi hasil penandaan rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan Subkegiatan tematik stunting dalam APBD Perubahan sebagaimana tertuang dalam SIPD pelaksanaan	Dokumen yang berisi hasil penandaan rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan Subkegiatan tematik stunting dalam APBD perubahan sebagaimana tertuang dalam SIPD pelaksanaan	Dokumen yang berisi hasil penandaan rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan Subkegiatan tematik stunting dalam APBD perubahan sebagaimana tertuang dalam SIPD pelaksanaan
3. Identifikasi capaian layanan dan realisasi kegiatan APBDes, Swadaya dan Swasta Semester 1			
Tujuan	Identifikasi capaian layanan APBD, APBDes, Swadaya dan Swasta merupakan bagian dari tahapan penguatan pelaksanaan yang menghasilkan dokumen identifikasi realisasi anggaran (APBDes, swadaya masyarakat, dan kemitraan), capaian layanan serta masalah yang dihadapi di suatu wilayah pada akhir semester 1		

PENGUATAN PELAKSANAAN

URAIAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
3. Identifikasi capaian layanan dan realisasi kegiatan APBDes, Swadaya dan Swasta Semester 1			
Tujuan	Identifikasi capaian layanan APBD, APBDes, Swadaya dan Swasta merupakan bagian dari tahapan penguatan pelaksanaan yang menghasilkan dokumen identifikasi realisasi anggaran (APBDes, swadaya masyarakat, dan kemitraan), capaian layanan serta masalah yang dihadapi di suatu wilayah pada akhir semester 1	Rekapitulasi hasil capaian kecamatan	Rekapitulasi hasil capaian kabupaten/kota
Langkah	1. Pemutakhiran data sasaran (yang terdapat dalam analisis situasi) 2. Pemutakhiran capaian layanan 3. realisasi program/kegiatan sampai dengan Juni tahun berjalan yang bersumber dari APBDes, swasta, swadaya masyarakat 4. permasalahan dan kendala layanan		

PENGUATAN PELAKSANAAN

URAIAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
3. Identifikasi capaian layanan dan realisasi kegiatan APBDes, Swadaya dan Swasta Semester 1			
Waktu	Juli		
Pelaksana	Operator kecamatan, verifikator kecamatan dan Camat		
Keluaran	Dokumen yang berisi hasil identifikasi realisasi anggaran (APBDes, swadaya masyarakat, dan kemitraan), capaian layanan serta masalah yang dihadapi di suatu wilayah pada akhir semester 1.		

PENGUATAN PELAKSANAAN

URAIAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
4. Identifikasi capaian layanan dan realisasi kegiatan APBDes, Swadaya dan Swasta Semester 2			
Tujuan	Identifikasi capaian layanan APBD, APBDes, Swadaya dan Swasta merupakan bagian dari tahapan penguatan pelaksanaan yang menghasilkan dokumen identifikasi realisasi anggaran (APBDes, swadaya masyarakat, dan kemitraan), capaian layanan serta masalah yang dihadapi di suatu wilayah pada akhir semester 2	Rekapitulasi hasil capaian kecamatan	Rekapitulasi hasil capaian kabupaten/kota
Langkah	1. Pemutakhiran data sasaran (yang terdapat dalam analisis situasi) 2. Pemutakhiran capaian layanan 3. realisasi program/kegiatan sampai dengan Desember tahun berjalan yang bersumber dari APBDes, swasta, swadaya masyarakat 4. permasalahan dan kendala layanan		



PENGUATAN PELAKSANAAN

URAIAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
4. Identifikasi capaian layanan dan realisasi kegiatan APBDes, Swadaya dan Swasta Semester 2			
Waktu	Desember		
Pelaksana	Operator kecamatan, verifikator kecamatan dan Camat		
Keluaran	Dokumen yang berisi hasil identifikasi realisasi anggaran (APBDes, swadaya masyarakat, dan kemitraan), capaian layanan serta masalah yang dihadapi di suatu wilayah pada akhir semester 2.		

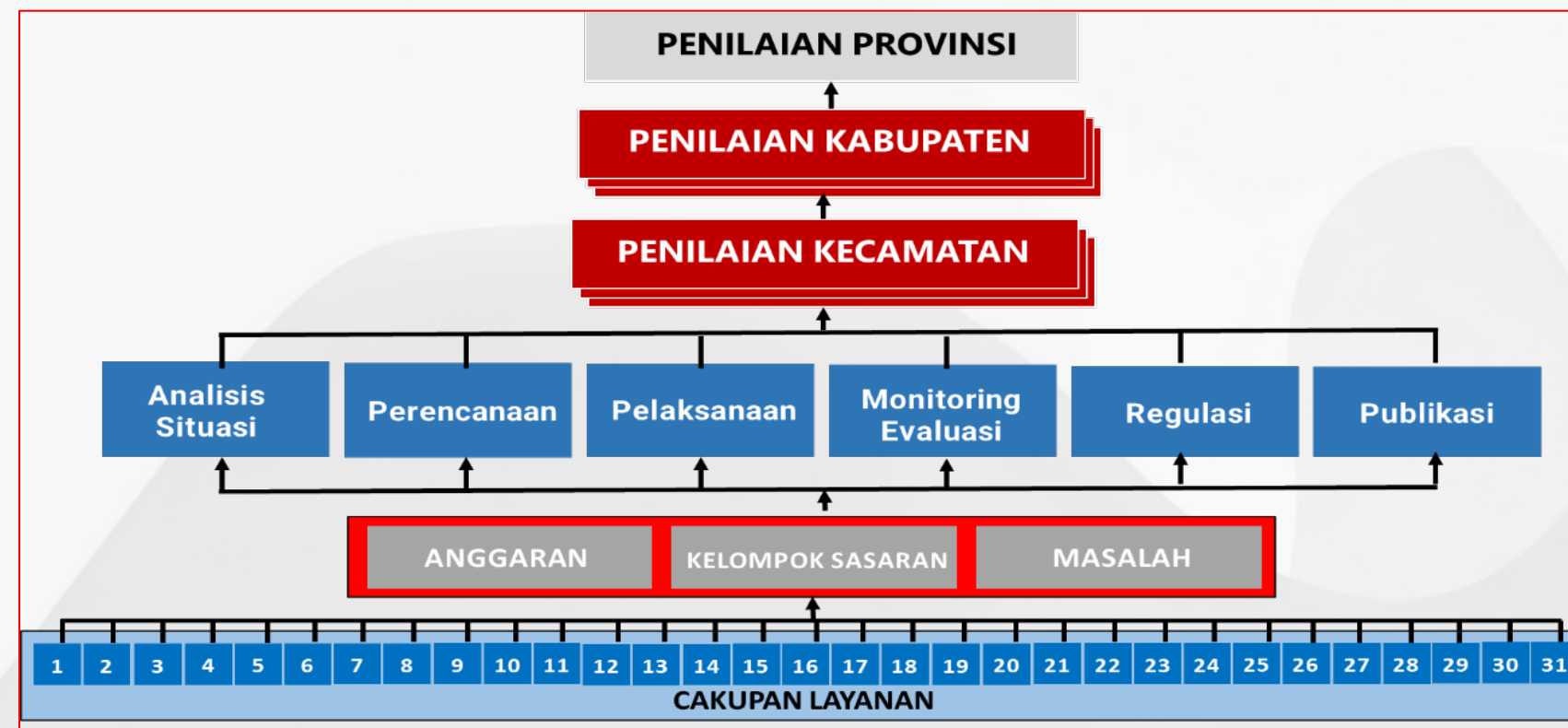
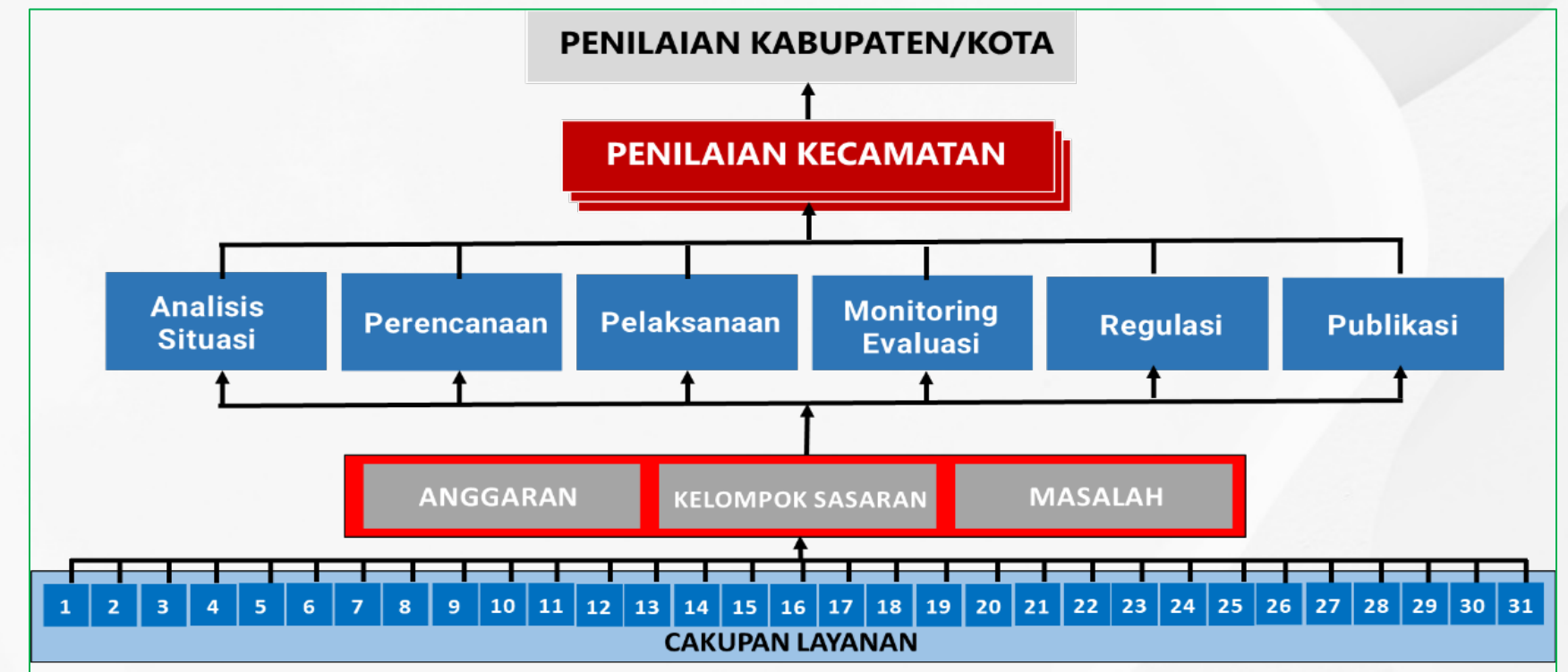
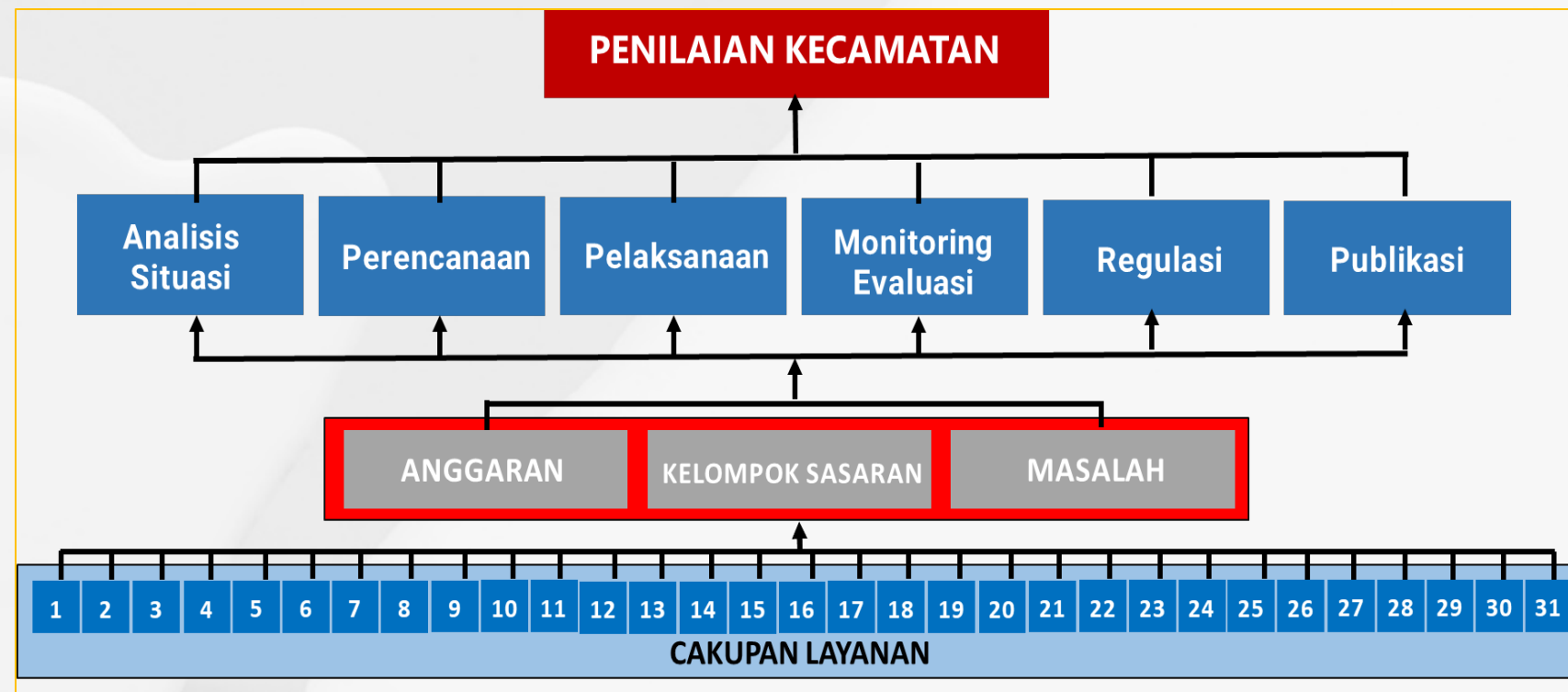


PENILAIAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Proses untuk menilai **capaian, efektivitas, efisiensi, dan dampak** dari pelaksanaan berbagai intervensi stunting yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan lintas sektor. Tujuan utamanya adalah untuk:

- Mengukur **kemajuan pelaksanaan program**.
- Mengidentifikasi **kendala dan tantangan** di lapangan.
- Memberikan **umpan balik** untuk perbaikan kebijakan dan pelaksanaan ke depan.

PENILAIAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI



PENILAIAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

URAIAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
1. Penilaian hasil Monitoring dan evaluasi			
Tujuan	Penilaian hasil monitoring dan evaluasi kecamatan merupakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di kecamatan dalam rangka memberikan umpan balik dan pembelajaran bagi pemerintah terkait kinerja kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang telah dilaksanakan	Penilaian hasil monitoring dan evaluasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting merupakan tahapan dalam aksi konvergensi di kabupaten/kota yang dilaksanakan dalam rangka evaluasi capaian pelaksanaan aksi konvergensi.	Penilaian hasil monitoring dan evaluasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting merupakan tahapan dalam aksi konvergensi di Provinsi yang dilaksanakan dalam rangka evaluasi capaian pelaksanaan aksi konvergensi
Langkah	pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas setiap tahapan aksi konvergensi kecamatan yang meliputi: - Hasil pelaksanaan Analisis Situasi; - Hasil pelaksanaan penguatan perencanaan; - Hasil pelaksanaan penguatan pelaksanaan; - Hasil pelaksanaan dukungan regulasi; dan - Hasil pelaksanaan publikasi.	- Bappeda menyampaikan hasil penilaian (skoring) dari web aksi bangda dengan hasil tumbuh, berkembang dan berdaya - Perangkat daerah menyampaikan capaian intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting - Skoring pelaksanaan tahapan aksi konvergensi di kabupaten/kota	- Bappeda menyampaikan hasil penilaian (skoring) dari web aksi bangda dengan hasil tumbuh, berkembang dan berdaya - Perangkat daerah menyampaikan capaian intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting - Skoring pelaksanaan tahapan aksi konvergensi di kabupaten/kota

PENILAIAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

URAIAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
1. Penilaian hasil Monitoring dan evaluasi			
Waktu	Desember	Desember	Desember
Pelaksana	Camat	Sekda dibantu Bappeda	Sekda dibantu Bappeda
Keluaran	a. Dokumen yang berisi hasil monitoring pelaksanaan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang meliputi: analisis situasi, penguatan perencanaan, penguatan pelaksanaan, dukungan regulasi dan publikasi terkait masalah yang dihadapi dan tindaklanjutnya. b. Dokumen yang berisi hasil penilaian pelaksanaan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	Dokumen hasil penilaian pelaksanaan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang meliputi: analisis situasi, penguatan perencanaan, penguatan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dukungan regulasi dan publikasi. Hasil penilaian aksi konvergensi di masing-masing wilayah maupun daerah dikelompokkan dalam klasifikasi Tumbuh, Berkembang dan Berdaya	Dokumen hasil penilaian pelaksanaan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang meliputi: analisis situasi, penguatan perencanaan, penguatan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dukungan regulasi dan publikasi. Hasil penilaian aksi konvergensi di masing-masing wilayah maupun daerah dikelompokkan dalam klasifikasi Tumbuh, Berkembang dan Berdaya.



DUKUNGAN REGULASI DAN PUBLIKASI

Memastikan keberlanjutan, legitimasi, dan keterlibatan publik dalam upaya penanggulangan stunting, baik di tingkat pusat maupun daerah.

REGULASI DAN PUBLIKASI

URAIAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
1. Dukungan Regulasi			
Tujuan	Dukungan regulasi/kebijakan guna memastikan setiap tahapan aksi konvergensi berjalan semestinya		
Bentuk	1. Berita Acara kesepakatan, 2. Surat Edaran	1. Peraturan Daerah 2. Peraturan Bupati 3. Surat Edaran 4. Berita Acara	1. Peraturan Daerah 2. Peraturan Bupati 3. Surat Edaran 4. Berita Acara
2. Publikasi			
Tujuan	Pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting harus terinformasikan dengan baik kepada semua pihak.	Pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting harus terinformasikan dengan baik kepada semua pihak.	Pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting harus terinformasikan dengan baik kepada semua pihak.
Bentuk	publikasi dapat dilakukan melalui web aksi bangda	publikasi dapat dilakukan melalui web aksi bangda	publikasi dapat dilakukan melalui web aksi bangda



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



"Dalam senyum dan tawa anak-anak,
tersimpan kekuatan untuk mengubah
dunia. Mari kita bimbing mereka dengan
cinta dan ilmu, agar mereka tumbuh
menjadi cahaya bagi bangsa."

TERIMA KASIH

Jl. Taman Makam Pahlawan No.20,
RT.12/RW.5, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12750

Telepon : 021 7942653

Email: ditjenbinabangda@kemendagri.go.id.



www.kemendagri.go.id



[Kemendagri.RI](https://www.youtube.com/Kemendagri.RI)



[Kemendagri](https://www.instagram.com/Kemendagri)



[Kemendagri](https://twitter.com/Kemendagri)



[Kemendagri_RI](https://www.facebook.com/Kemendagri_RI)